

PENYUSUNAN ROAD MAP POS PELAYANAN TEKNOLOGI KOTA SURAKARTA

¹Widyawati, ²Budiyono

^{1,2}Universitas Dr. Soetomo Surabaya

¹widyawati@unitomo.ac.id, ²budiyono@unitomo.ac.id

Abstrak

Pembangunan merupakan usaha atau proses perubahan, untuk tercapainya suatu tingkat kesejahteraan dan mutu hidup kelompok masyarakat atau individu didalamnya yang berkeinginan serta melaksanakan pembangunan. Salah satu program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam bentuk Posyantek Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK). Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berkaitan dengan Pos Pelayanan Teknologi sebagai sumber utama dan dokumen lain yang relevan sebagai sumber tambahan, dimana Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah; pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah ; rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai fasilitator mengadakan semacam rangkaian perlombaan TTG. Dengan memberikan pelatihan, dan melakukan pembinaan serta pendampingan, pembinaan merupakan kegiatan keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Posyantek. Kegiatan tersebut melibatkan sekelompok masyarakat yang sama-sama memiliki keinginan untuk mendapatkan pelatihan. Posyantek membutuhkan orang yang berpengaruh di setiap daerah yang akan didatangi. Sasaran awal program kegiatan adalah masyarakat yang mempunyai usaha kecil, hal ini dilakukan agar masyarakat yang mempunyai usaha tersebut dapat bekerja lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan TTG, sehingga hasil produksi usaha akan semakin mengalami peningkatan. Posyantek menggunakan beberapa media agar dapat melakukan komunikasi dengan skala yang lebih luas yaitu, melalui jejaring sosial seperti facebook. Cara ini cukup efektif karena perkembangan saat ini menjadikan masyarakat lebih mengenal teknologi komunikasi yang ada.

Kata Kunci : *Posyantek, Program Pemerintah, Usaha Kecil*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses terencana guna menciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dengan cepat, serta dapat memberikan berbagai macam perubahan kemajuan dalam segala bidang aspek bagi masyarakat (Priatama, 2013). Riyadi dalam (Mardikanto & Soebiato, 2013), juga mendefinisikan pembangunan yaitu merupakan usaha atau proses perubahan, untuk tercapainya suatu tingkat kesejahteraan dan mutu hidup kelompok masyarakat atau individu didalamnya yang berkeinginan serta melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud yaitu pembangunan secara menyeluruh baik dari segi sosial, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan.

Pembangunan tidak hanya membantu memenuhi sarana dalam bentuk nyata seperti bangunan, jembatan, jalan ataupun bantuan sesaat yang diberikan pada masyarakat. Pembangunan hendaknya juga memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi mandiri dengan keterampilan yang dimiliki, secara tidak langsung akan membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan (Anwas, 2014). Maka faktor utama dari kemiskinan juga terletak pada kualitas SDM suatu daerah, yang mana menjadi fokus perhatian penelitian ini. Perbaikan kualitas masyarakat dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan pada masyarakat, dengan memberikan

pengetahuan dan pelatihan agar mereka dapat mengembangkan diri.

Pemberdayaan merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki. Selain itu pemberdayaan juga merupakan suatu upaya mendorong masyarakat untuk mampu menjadi sosok utama dalam memanfaatkan lingkungannya guna mencapai suatu keberlanjutan untuk jangka panjang (Priatama, 2013). Seperti yang diungkapkan Santoso (2016) bahwa, pemberdayaan dengan

kualitas masyarakatnya yang mandiri bisa menjadi sumbangan dalam kemajuan pembangunan nasional.

Salah satu program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam bentuk Posyantek Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi tentang TTG. Lembaga ini memanfaatkan teknologi buatan yang dapat membantu kegiatan usaha masyarakat di kecamatan, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakatnya. Pentingnya penyebaran informasi menjadikan komunikasi sebagai salah satu aspek tercapainya keberhasilan pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat (Indardi, 2016). Agar program pemberdayaan ini berjalan secara komprehensif perlu adanya suatu peta jalan (road map) program Posyantek.

Kajian Pustaka

Konsep Kebijakan Publik

Dalam Suwitri (2008) dijelaskan bahwa terdapat beberapa teori kebijakan publik menurut para ahli administrasi publik yang dapat dijelaskan sebagai beberapa ide sebagai berikut:

1. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah

Thomas R. Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Pemerintah memiliki

kewenangan untuk mengambil pilihan tindakan untuk mencapai tujuan negara. Tindakan untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena tindakan tersebut memiliki besar dampak yang sama pada publik dan negara dibandingkan dengan pilihan tindakan lainnya. Dalam definisi ini, pemerintah memiliki kekuatan dalam decision making dan mempunyai wewenang dalam memutuskan sesuatu secara otoriter, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi untuk mengatasi persoalan publik. Teori ini juga didukung oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang disebutkan dan dilakukan oleh pemerintah baik itu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam policy statement seperti pidato dan janji politik yang diungkapkan oleh pejabat politik dan pejabat pemerintahan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan program-program. James E. Anderson juga mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah, baik itu badan-badan maupun pejabatnya.

2. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah

Teori ini didukung oleh Harold D. Laswell, Abraham Kaplan, dan David Easton. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Easton berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh anggota masyarakat secara paksa dan legal. Definisi menurut Easton ini dikategorikan sebagai suatu intervensi oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah publik melalui tindakan kepada masyarakat. Tindakan tersebut merupakan proses manajemen

dan bagian dari tahapan kerja pejabat publik.

3. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan

James E. Anderson, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan definisi kebijakan publik yang mendukung teori ini. Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan menurut Edwards III dan Sharkansky, kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan

Konsep Kreativitas

Bryd dan Bryman (2003) menyatakan bahwa terdapat dimensi yang mendasari keberhasilan, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru yang terdiri dari tiga aspek, yaitu keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif. Dalam proses kreativitas, individu mempunyai ide-ide baru berdasarkan proses berpikir imajinatif dan didukung oleh motivasi internal yang tinggi.

Kreativitas adalah potensi yang dimiliki setiap orang, sehingga kreativitas sebenarnya dapat diasah dan dimanfaatkan. Dalam proses mengasah kreativitas atau melatih pola pikir kreatif, menurut Edward de Bono (Endang Supardi, 2004) harus melalui 4 (empat) proses perkembangan, yaitu: Latar Belakang atau Akumulasi Pengetahuan; Proses Inkubasi; Melahirkan Ide ; Evaluasi dan Implementasi

Menurut Amabile (2012), kreativitas adalah menghasilkan ide-ide baru yang berguna dalam bidang apapun koneksi dan hasil yang baru serta bermakna. Hal ini berarti mengembangkan ide alternatif atau kemungkinan lain dengan bermacam-macam cara sehingga dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dalam interaksi individu dengan lingkungan sehingga diperoleh cara-cara

baru untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna.

Konsep Inovasi

Menurut Amabile (2012), inovasi yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan ide-ide kreatif. Selain itu pengertian inovasi adalah tindakan yang memberi sumber-daya kekuatan dan kemampuan baru untuk menciptakan kesejahteraan, dengan kata lain inovasi menciptakan sumber-daya. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sumber-daya sampai orang menemukan manfaat dari sesuatu yang terdapat di alam, sehingga memberinya nilai ekonomis (Drucker, 1986). Pada tahun 1949 Schumpeter (dalam Hermana, 2008) menyebutkan bahwa inovasi terdiri dari lima unsur yaitu: (1) memperkenalkan produk baru atau perubahan kualitatif pada produk yang sudah ada, (2) memperkenalkan proses baru ke industri, (3) membuka pasar baru, (4) Mengembangkan sumber pasokan baru pada bahan baku atau masukan lainnya, dan (5) perubahan pada organisasi industri.

Inovasi adalah terapan yang bersifat konseptual dan perseptual, sehingga inovator harus keluar, melihat, bertanya dan mendengarkan fenomena yang ada disekitarnya. Inovator yang sukses menggunakan kedua sisi otaknya. Mereka mempelajari peluang apa yang bisa dikembangkan guna dijadikan inovasi. Mereka melihat dan mengamati setiap potensial kostumer apa harapan mereka, nilai yang mereka butuhkan dan kebutuhan mereka. Agar berjalan efektif, inovasi harus mudah dan dilakukan dengan fokus. Inovasi harus pada satu bidang, jika tidak akan membingungkan orang. Inovasi harus dimulai dari yang kecil, ini bukan merupakan perubahan yang besar. Perubahan kecil bisa membawa perubahan yang besar, sebaliknya jika perubahan dilakukan secara besar-besaran biasanya justru tidak akan efektif (Drucker, 2002). inovasi yang sistematis berarti memantau 7 (tujuh) sumber peluang inovasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam perumusan profil anak ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan yang berkaitan dengan Pos Pelayanan Teknologi sebagai sumber utama dan dokumen lain yang relevan sebagai sumber tambahan.

1. Kegiatan Persiapan.

Persiapan awal berupa mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta di Kota Surakarta.

Persiapan instrumen survey berupa:

- Persiapan daftar data/inventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta di Kota Surakarta .Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan analisis yang berupa: Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Peraturan Walikota, Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berkaitan dengan Pelayanan Teknologi di Kota Surakarta..

- Penyusunan daftar pertanyaan

2. Kegiatan Pengumpulan Data, Survei Dan Wawancara

Pengumpulan data, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing instansi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota untuk mendukung kegiatan Penyusunan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Surakarta..

Survei, adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika di butuhkan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta.

Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab kepada naras umber/keyinforman atau pemangku kepentingan yang membidangi dan paham terhadap kegiatan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta ..

3. Kegiatan Pengolahan Data Dan Analisa.

Kompilasi data. Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Memadukan data antara data primer dan data sekunder
- b. Mentabulasi dan mensistemasikan fakta dan informasi sesuai keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
- c. Tersusunnya informasi/data mengenai Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta .

4. Kegiatan Penyusunan.

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya adalah tahapan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta. Adapun keluaran atau output adalah Buku Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Eksisting

Pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan TTG. Pemetaan kebutuhan dilakukan untuk mengenali potensi-potensi dan masalah yang ada di daerah/desa. Pemetaan kebutuhan ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha masyarakat, sosial budaya dan potensi sumberdaya lokal. Pemetaan kebutuhan yang dimaksudkan tidak hanya berbentuk data secara manual/statistic, melainkan juga gambaran peta tematik yang menunjukkan wilayah atau daerah lengkap dengan potensi sumberdaya dan usaha yang dimiliki. Gambaran peta disini akan membantu proses identifikasi pemberian bantuan jenis TTG yang sesuai dengan kebutuhan potensi wilayah dalam masyarakat.

Bidang usaha yang dimiliki masyarakat berbagai macam bentuknya, mulai dari industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis usaha dan potensi wilayah dalam masyarakat maka dapat diidentifikasi alat TTG yang sesuai kebutuhan. Hasil analisis terhadap pemetaan kebutuhan TTG yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat berjalan dengan baik, pengumpulan data dilakukan di berbagai daerah dengan melihat berbagai jenis usaha dan potensi sumberdaya lokal yang dirangkum dalam sebuah dokumen berbentuk tabel. Selama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan secara manual dimana belum terdapat gambaran peta yang menunjukkan wilayah berpotensi dalam masyarakat.

Langkah kedua, yaitu pengkajian TTG. Pengkajian merupakan suatu proses kegiatan dalam mengkaji atau menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG yang telah dilakukan sebelumnya. Pengkajian TTG ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi proposal dari kelompok masyarakat yang layak diberikan bantuan TTG sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pengkajian ini dilakukan melalui rapat dengan tim koordinasi dalam rangka memverifikasi kebutuhan kelompok masyarakat serta melakukan evaluasi terkait pengembangan inovasi usaha masyarakat pengguna TTG. Pelaksanaan pengkajian TTG ini sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan TTG.

Pengembangan TTG dilakukan melalui inovasi dan uji coba TTG yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan pengembangan TTG, ada beberapa kemungkinan potensi yang terkandung dalam masyarakat. Jadi, untuk melakukan pengembangan TTG perlu menggunakan difusi, yakni proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu dan untuk dapat melaksanakan konsep difusi inovasi diperlukan adanya kerjasama antar institusi terkait (*stake holder*).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai fasilitator mengadakan semacam rangkaian perlombaan TTG. Beberapa contoh alat-alat inovasi TTG, seperti becak penyapu sampah, alat perajang, dsb. Produk-produk alat TTG yang telah tercipta dari berbagai kelompok masyarakat kemudian diperkenalkan melalui

pemasyarakatan TTG. Pemasyarakatan TTG bertujuan untuk lebih mengenalkan TTG secara lebih luas dengan melalui kegiatan-kegiatan, seperti gelar/pameran teknologi tepat guna, lokakarya, temu informasi teknologi tepat guna, pelatihan, pendampingan, komunikasi informasi dan edukasi, atau media massa. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mengikuti Gelar TTG Nasional rutin setahun sekali sebagai langkah strategis dalam menyebarkan informasi berbagai teknologi yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan sebagai forum untuk menggali pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan penerapan dan pengembangan TTG di masa mendatang. Peserta Gelar TTG Nasional berasal dari 33 Provinsi se- Indonesia.

Orientasi Posyantek dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas (*knowledge, skill dan attitude*) bagi pengurus Posyantek, khususnya dalam hal ini pengelolaan manajemen Posyantek. Namun, dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakatnya mengundang secara garis besar atau beberapa perwakilan dari Posyantek, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Selain memberikan pelatihan dan pemberian bantuan langsung, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok masyarakat. Pendampingan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG. Bapermades melakukan pendampingan dengan berkoordinasi dengan lembaga pelayanan TTG. Lembaga pelayanan TTG terdiri atas Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) yang berkedudukan di Kecamatan. Posyantek merupakan embrio dari TTG. Posyantek memiliki empat fungsi, yaitu sebagai:

- a. *Chanelling*, artinya menghubungkan pembuat mesin dan konsumen (masyarakat).

- b. Perpustakaan, artinya menyediakan buku-buku dan cara-cara mengenai Teknologi Tepat Guna.
- c. Informasi, artinya memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan TTG kepada masyarakat.
- d. Bengkel, artinya menerima pemesanan dan memperbaiki alat-alat TTG.

Keberadaan Posyantek dinilai sangat penting dalam proses penerapan TTG dalam masyarakat. Setiap Kabupaten harus memiliki Posyantek di tingkat Kecamatannya, karena hal ini telah diinstruksikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat berwenang melaksanakan fungsi pengkoordinasian dan mensinkronkan berbagai program pemberdayaan secara *integrated* yakni mampu menciptakan sistem, mensinergikan dan menjembatani keseluruhan program pemberdayaan masyarakat.

Kendala - Kendala dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Kendala merupakan suatu hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan program pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Kendala tersebut dapat berasal dari individu/pegawai, internal organisasi maupun dari faktor di luar lingkungan organisasi. Hasil analisis taksonomi mengenai kendala pelaksanaan program pengelolaan TTG dapat berasal dari komunikasi, sumberdaya, sikap, struktur organisasi dan faktor lingkungan.

- Komunikasi
 - Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang optimal
 - Juknis hanya berupa dokumen yang sebagian besar membahas pemberian bantuan
 - Media informasi masih dengan sosialisasi kepada masyarakat,
 - Respon penerima informasi tergantung dari masing-masing individu

- Sumberdaya
 - Jumlah pengurus posyantek masih sangat terbatas mengakibatkan keterbatasan jangkauan pelaksanaan kegiatan TTG kepada masyarakat
 - Minimnya anggaran
 - Pelaksanaan kegiatan hanya berdasarkan kewenangan yang ada dalam peraturan
- Sikap
 - Pemahaman pelaksanaan program sangat tergantung pada masing-masing pegawai
 - Harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan program terkadang tidak sama
 - Masih terdapat harapan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Struktur Organisasi
 - Selama ini pelaksanaan kegiatan hanya berpedoman pada juknis dan belum terdapat SOP yang khusus mengatur program TTG secara menyeluruh
- Faktor Lingkungan
 - Sulit untuk mengubah persepsi yang ada di masyarakat terkait program TTG dipengaruhi dari pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat
 - Hanya kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang dapat memanfaatkan program TTG
 - Terkendala dalam mencari inovator pembuat alat TTG
 - Belum terdapat peraturan setingkat Peraturan Bupati di daerah yang mendukung pelaksanaan program TTG
 - Belum terdapat peraturan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani teknologi tepat guna
 - Pelatihan orientasi posyantek yang secara bergilir dan hanya perwakilan
 - Beberapa Posyantek belum mampu menyediakan informasi
 - Produk usaha masyarakat masih dipasarkan secara lokal karena belum adanya kerjasama dengan pihak seperti koperasi dan sebagainya

Perlu adanya pembimbingan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat selaku fasilitator dalam pelaksanaan program pengelolaan TTG agar masyarakat mampu meningkatkan kualitasnya dalam mengembangkan usaha mereka melalui teknologi tepat guna

2. Arah dan Strategi Pengembangan

Pengembangan Posyantek difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;

Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;

Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

3. Pemihakan Dan Pemberdayaan Masyarakat;

Posyantek sebagai lembaga yang bergerak dalam pelayanan dan informasi tentang TTG, mempunyai program untuk mensosialisasikan alat-alat TTG kepada masyarakat. Sosialisasi bukan hanya sebagai media pengenalan namun juga sebagai pemantik guna menumbuhkan minat dan ketertarikan mereka akan TTG.

Salah satu cara yang efektif agar masyarakat semakin mengenal TTG adalah dengan memberikan pelatihan, dan melakukan pembinaan serta pendampingan. Pelatihan, pembinaan dan pendampingan merupakan keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Posyantek. Kegiatan tersebut melibatkan sekelompok masyarakat yang sama-sama memiliki keinginan untuk mendapatkan pelatihan. Berkumpulnya masyarakat yang tertarik akan program Posyantek melakukan proses komunikasi kelompok, dimana mereka memiliki keinginan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan baru serta pelatihan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. *Training* atau pelatihan adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan seorang anggota dalam melaksanakan pekerjaan tertentu (Kamil, 2012). Kegiatan pelatihan dilakukan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat tentang penggunaan alat tepat guna, kemudian pembinaan dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan usaha dengan menggunakan TTG dan pendampingan dilakukan dalam setiap usaha untuk mencapai keberhasilan usaha. Maka dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat pelaku usaha, mereka akan lebih mengenal TTG sehingga kegiatan produksi berjalan efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya.

Pendampingan merupakan bentuk program dari Posyantek dalam upaya meningkatkan produksi para pelaku usaha, serta menjadikan kegiatan usaha yang dilakukan menjadi lebih baik dengan adanya masukan-masukan yang diberikan oleh pengurus dari setiap proses produksi. Pendampingan merupakan salah satu strategi dalam menentukan keberhasilan program Posyantek. Pendamping hadir sebagai agen pemberdaya yang membantu serta terlibat langsung dalam rangka mengoptimalkan kelompok usaha. Maka pemerintah memberikan kebijakan terhadap balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kemampuan pendamping kelompok usaha bersama melalui dunia pendidikan sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Nurhasanah, Kamil, & Saepudin, 2016). Kehadiran TTG terkadang membuat masyarakat masih belum mampu menggunakannya secara optimal, sehingga membutuhkan pendampingan dari para pengurus Posyantek.

Peran pengurus Posyantek terlihat sebagai fasilitator dalam upaya menyusun rencana- rencana pembangunan usaha, hal ini ditandai dengan pengurus Posyantek melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada dalam kelompok masyarakat. Menurut (Sianipar, Yudoko, Adhiutama, & Dowaki, 2013) ada tiga tahap dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan alat untuk masyarakat setempat, mengajari mereka

bagaimana menggunakan dan memelihara dengan metode yang lebih baik, dan juga mengajarkan mereka bagaimana untuk membuatnya dengan dirinya sendiri, menyesuaikan fungsi berdasarkan kondisi yang diperlukan. Upaya ini akan mempertahankan pembangunan berkelanjutan, memberdayakan masyarakat setempat. Ketika orang luar meninggalkan mereka, masyarakat setempat akan mempertahankan pembangunan berkelanjutan oleh dirinya sendiri.

Pemberian informasi atau pengetahuan baru pada masyarakat, sekaligus adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan merupakan bentuk usaha dalam mencapai keberhasilan program Posyantek dan usaha masyarakat. Sehingga dengan adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik dan segala bentuk permasalahan yang ada dapat didiskusikan bersama untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Menurut (Suharto, 2009) memaparkan bahwa pendampingan adalah interaksi dinamis antara kelompok masyarakat untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti, merancang program perbaikan kehidupan ekonomi, mobilisasi sumberdaya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerja sama dengan pihak lain yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan kelompok yang dilakukan oleh Posyantek dengan kelompok masyarakat menjadi alat yang dapat membantu Posyantek dalam penerimaan ide-ide baru oleh masyarakat. Sekaligus menjadi ajang untuk berdiskusi, sehingga Posyantek mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kelompok binaan. Diskusi merupakan proses komunikasi, dimana pengirim pesan dan penerima pesan saling berinteraksi dalam suatu waktu yang mana pada akhirnya dapat berbagi makna yang sama (Satriani, Muljono, & Lumintang, 2011). Dalam proses tersebut kelompok binaan menerima informasi baru yang dapat membantu mereka dalam penyelesaian

masalah pengolahan pangan dan produksi. Pengumpulan informasi tersebut menurut Follet dalam (Littlejohn, 2009) merupakan salah satu langkah kreatif dalam penyelesaian masalah organisasi atau komunitas, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari para ahli. Maka komunikasi kelompok yang telah dilakukan oleh Posyantek berampak positif terhadap kelompok binaan, karena mereka mau membuka diri dengan selalu menanyakan hal yang masih belum dipahami dalam sebuah diskusi.

Pemantapan Otonomi Dan Pendelegasian Wewenang Dalam Pengelolaan Pembangunan Yang Mengembangkan Peran Serta Masyarakat

Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga sosial atau pemerintah dapat berjalan baik, dengan adanya dukungan melalui komunikasi yang tepat untuk dapat mempengaruhi masyarakat. Komunikasi tersebut merupakan usaha untuk penerimaan program pembangunan yang telah dirancang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam penerimaan hal baru bagi masyarakat tersebut, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mereka dapat mengambil keputusan, menerima atau menolak hal baru tersebut. Hal baru disini dapat dikatakan sebuah inovasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Posyantek memberikan inovasi baru sebagai solusi kebutuhan masyarakat, yaitu dengan alat yang direkayasa dan dikenalkan pada masyarakat.

Inovasi TTG yang ditawarkan Posyantek pada masyarakat tidak selalu berbentuk alat, namun juga sebuah metode atau pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Agar tersampaikan solusi dan program yang dimiliki oleh Posyantek pada kelompok usaha kecil, maka pemberdaya melakukan pendekatan langsung. Pendekatan secara interpersonal juga dilakukan oleh Posyantek agar inovasi

tersebut dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat.

Pendekatan secara personal dengan mudah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan manfaat penggunaa TTG, dimana Posyantek dengan mudah mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk menerima inovasi baru. Seperti yang diungkapkan oleh (Satriani et al., 2011), bahwa melakukan pendekatan dengan komunikasi akan memberikan dampak lebih mendalam, karena dapat mengajak serta mempengaruhi sikap masyarakat untuk menerima informasi tersebut. Posyantek dengan melakukan pendekatan secara personal, memberikan dampak dapat meluasnya pemahaman akan TTG dengan cepat pada masyarakat. Sehingga masyarakat juga cepat menerima inovasi baru yang disampaikan oleh Posyantek.

Komunikasi menjadi kunci keberhasilan Posyantek dalam menyampaikan pesan pemberdayaan, sehingga masyarakat dapat menerima perubahan yang ditawarkan oleh posyantek. Perubahan merupakan hal baru yang masyarakat masih belum memahaminya, maka proses penyebaran atau pendefusian inovasi baru pada masyarakat sangat ditekankan. Hal tersebut dikarenakan difusi inovasi membutuhkan waktu dalam penerimaan oleh masyarakat yang diberdayakan.

Dalam proses tersebut masyarakat memiliki rentan waktu untuk dapat langsung menerima dan mengadaptasi secara langsung atau bahkan menolak. Maka penting bagi pemberdaya untuk memperhatikan kesesuaian pesan atau inovasi yang ingin disampaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal tersebut posyantek telah mempetakan kepada kelompok-kelompok usaha kecil yang menjadi sasaran kegiatan posyantek. Mereka memberikan informasi dalam pengolahan makanan dengan bahan yang aman.

Penajaman Arah Perubahan Struktur Sosial Ekonomi, Budaya Dan Politik Yang Bersumber Pada Partisipasi Masyarakat.

Untuk bisa masuk ke dalam kelompok masyarakat, Posyantek membutuhkan orang yang berpengaruh disetiap daerah yang akan didatangi. Keikutsertaan kepala kelurahan ataupun orang yang dihormati didaerah tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan yang akan dilakukan Posyantek, karena mereka yang dapat menjembatani antara Posyantek dan masyarakat. Pemilihan kepala kelurahan dan atau camat sebagai *opinion leaders* oleh Posyantek, karena dianggap sebagai tokoh yang memiliki *power* dalam mengumpulkan masyarakat. Dalam proses tersebut terlihat kepala desa berperan sebagai pendukung proses sosialisasi Posyantek mengenai TTG pada masyarakat. Kehadiran kepala desa dan tokoh masyarakat dapat memberikan kemudahan bagi Posyantek untuk tersampainya program pemberdayaan yang telah disusun untuk perbaikan kondisi masyarakat. Kepala desa ataupun tokoh masyarakat menjadi *opinion leader* yang membantu penyebaran informasi dari pihak pemberdaya kepada masyarakat, karena mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Sehingga bisa dikatakan *opinion leader* menjadi faktor penting yang membantu orang luar untuk pemberian informasi dan pemberdayaan pada masyarakatnya (Manopo, 2013). Tokoh masyarakat menjadi media promosi bagi kelompok luar yang ingin masuk dalam lingkungan masyarakat, karena dari mereka keinginan dan tujuan pemberdaya dapat tersampaikan dengan cepat pada masyarakat (Satriani et al., 2011).

Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah informasi atau program baru yang bertujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Tujuan dari sosialisasi dalam pemberdayaan adalah untuk menciptakan komunikasi antara pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan, agar pemberdaya dengan mudah dapat memberikan informasi mengenai suatu informasi atau program, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan tujuan program pembangunan. Begitu juga yang dilakukan oleh Posyantek, untuk memberi

informasi dan mengenalkan manfaat penggunaan TTG pada masyarakat maka mereka mensosialisasikan alat-alat TTG. Maka untuk mempermudah proses sosialisasi tersebut, terlebih dahulu Posyantek telah menentukan masyarakat sasarnya.

Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program (Sankarto & Iskak, 2008). Posyantek sebagai agen pemberdayaan sekaligus sebagai fasilitator dijelaskan oleh (Fernandez, Vidueira, Diaz, & De, 2015), fasilitator merupakan point penting karena mereka akan terlibat langsung dalam proses pemberdayaan kelompok-kelompok kecil, dengan melakukan pendekatan juga memberikan semangat bagi masyarakatnya.

Sosialisasi atau pemasyarakatan program adalah tahapan penting dalam program pengembangan masyarakat (Arbi, 2016). Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang TTG dan jasa layanannya, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan perbaikan kondisi ekonomi mereka. Agar layanan Posyantek sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka mereka membangun dialog dengan masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dapat dilayani oleh pengurus Posyantek. Sebuah dialog yang terbentuk antara pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan merupakan salah satu konsep dari komunikasi partisipatif, yaitu adanya transaksi antara pengirim pesan dan penerima pada satu waktu yang sama, sehingga dapat berbagi pemahaman akan pesan yang disampaikan. Maka dengan adanya dialog yang terbangun, Posyantek mengetahui kondisi masyarakat dan apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok usaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka.

Sasaran awal program kegiatan adalah masyarakat yang mempunyai usaha kecil, hal ini dilakukan agar masyarakat yang mempunyai usaha tersebut dapat bekerja lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan TTG, sehingga hasil produksi usaha akan semakin mengalami peningkatan. Penentuan kelompok usaha kecil merupakan usaha pemberdaya dalam pemanfaatan sumber daya dan juga keterampilan masyarakat, sehingga kegiatan yang dirancang akan lebih terorganisir. Menjadikan kelompok usaha kecil sebagai sasaran kegiatan posyantek, agar dapat memperbaiki dengan cepat permasalahan ekonomi masyarakat di desa. Usaha kecil yang ada di desa diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, urbanisasi, serta pembangunan tidak merata. Sehingga kelompok usaha kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perbaikan pembangunan serta peningkatan produktivitas usaha (Gunawan, 2014).

Dalam proses sosialisasi tersebut Posyantek sebagai komunikator melakukan pendekatan pada masyarakat baik secara interpersonal maupun kelompok, agar dapat diterima kehadirannya program yang akan dikenalkan pada masyarakat (Jones, 2013). Dalam proses tersebut membentuk sebuah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih, dimana mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah *feedback* dari komunikannya (Utomo, 2015).

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh Posyantek dengan pengenalan tentang Posyantek dan penjelasan mengenai TTG pada masyarakat, serta langsung memberikan contoh dalam penggunaannya dapat diterima dengan baik oleh kelompok masyarakat. Komunikasi yang terjadi dalam proses ini menunjukkan bahwa adanya dampak sosialisasi yang disampaikan oleh Posyantek cukup berhasil. Terlihat dari ketertarikan masyarakat dengan memberi pertanyaan atas informasi yang disampaikan oleh Posyantek. Sosialisasi dapat dikatakan berhasil dengan adanya *feedback* dari masyarakat, yang dianggap

sebagai komunikasi timbal balik dan menandakan penerimaan program dari pemberdaya (Nurdin, Cangara, & Sultan, 2014). Posyantek dalam penyampaian pesan dikatakan berhasil, karena masyarakat sasaran bisa memberikan pertanyaan yang menandakan adanya pemahaman akan pesan yang telah disampaikan oleh Posyantek. Terlebih penyampaian pesan didukung dengan praktek yang menjadikan pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Untuk mendukung proses penyebaran pesan Posyantek menggunakan beberapa media agar dapat melakukan komunikasi dengan skala yang lebih luas yaitu, melalui jejaring sosial seperti facebook. Cara ini cukup efektif karena perkembangan saat ini menjadikan masyarakat lebih mengenal teknologi komunikasi yang ada

Kesimpulan

Kota Surakarta merupakan pusat perdagangan dan jasa. Hal tersebut sangat didukung dengan posisi kota yang strategis diantara jalur pusat kota Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.

Sektor konstruksi, Perdagangan, informasi dan komunikasi, serta kategori Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan Kota Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari besarnya angka yang menyumbang pada besarnya angka PDRB secara keseluruhan. Kontribusi kategori terbesar terhadap ekonomi Kota Surakarta yaitu konstruksi sebesar 26,97 % ditahun 2016 mengalami penurunan 26,71 % di tahun 2017 (Konstruksi). Kontribusi kategori terbesar kedua adalah Perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 22,45 % di tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu sebesar 22,43%.

Pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan TTG. Pemetaan kebutuhan dilakukan untuk mengenali potensi-potensi dan masalah yang ada di daerah/desa. Pemetaan kebutuhan ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha masyarakat, sosial budaya dan potensi sumberdaya lokal. Bidang usaha yang

dimiliki masyarakat berbagai macam bentuknya, mulai dari industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis usaha dan potensi wilayah dalam masyarakat maka dapat diidentifikasi alat TTG yang sesuai kebutuhan.

Pengembangan TTG dilakukan melalui inovasi dan uji coba TTG yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan pengembangan TTG, ada beberapa kemungkinan potensi yang terkandung dalam masyarakat. Jadi, untuk melakukan pengembangan TTG perlu menggunakan difusi, yakni proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu dan untuk dapat melaksanakan konsep difusi inovasi diperlukan adanya kerjasama antar institusi terkait (stake holder).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai fasilitator mengadakan semacam rangkaian perlombaan TTG. Beberapa contoh alat-alat inovasi TTG, seperti becak penyapu sampah, alat perajang, dsb.

Daftar Pustaka

- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (kedua). Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, B. (2014). *Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna*. Universitas Negeri Semarang.
- Hudri, Abdullah, M. M., & Sailillah, M. S. (2015). *Peranan Komunikasi Badan Keswadaya Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Banjarmasin*. *Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*,
- Kamil, M. (2012). *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta.
- Khusnawati, E., & Prasetyo, Y. E. (2016). *Difusi dan Adopsi Teknologi Tepat Guna Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Observasi Pada Kegiatan IPTEKDA LIPI di Kabupaten Subang*. *Seminar Nasional IENACO*, 1, 753–760.

- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (kedua)*. Bandung: Alfabeta.
- Maryatun, & Lasa, H. . (2009). *Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Turi dan Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)*. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, V.
- Prastyanti, S. (2013). *Difusi Inovasi Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat*. *Acta Diurna*,
- Priatama, D. (2013). *Strategi Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Sosialisasi Program Pembinaan Masyarakat Di Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda*. *Ejournal Ilmu Komunikasi Fisip Unmul*, 1(2), 70–84.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- R, D., Suseno, T., Janu, R. I., & Badar, A. M. (2008). *Peran Teknologi Tepat Guna Untuk Masyarakat Daerah Perbatasan*. *Sosioteknologi*, 13(April), 329–333.
- Rahmiyati, N., Andayani, S., & Panjaitan, H. (2015). *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto*. *Ilmu Ekonomi & Manajemen*.
- Satriani, I., Muljono, P., & Lumintang, R. (2011). *Komunikasi Partisipatif Pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor)*. *Komunikasi Pembangunan*,
- Soetomo. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Triyono, A., Purworini, D., & Murti P, M. (2016). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Masyarakat Gunung Kemukus Kabupaten Sragen Melalui Komunikasi Pembangunan*.